

Volume: 8 Nomor: 1 Tahun 2021

[Pp. 92 - 110]

KONFLIK ACEH: STUDI PEMAAFAN PADA AKTIVIS PEREMPUAN ACEH

Khairul Fahmi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: khairulfahmi815@gmail.com

No HP/WA: 082370507023

Ahmad Yazid

IAIN Pontianak, Indonesia

Email: yazidkembayan@gmail.com

No HP/WA: 0896 6283 5737

ABSTRACT

This study aims to reveal aspects of forgiveness by women activists in the Aceh conflict. This study uses a life story approach in which the data obtained comes from interviews with several Aceh women activists. The results of this study indicate that forgiveness by Aceh women activists is conditional forgiveness. Conditional forgiveness is influenced by religious values, the suffering of victims of conflict in the past, and the issue of the rights of victims during the conflict that have still not been fulfilled.

Keywords: Aceh Conflict, Forgiveness, Aceh Women Activists

PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 Maret 2014 di Stadion Tunas Bangsa Lhokseumawe, Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Aceh atas segala kelakuan serta pelanggaran Prajurit Kopassus selama konflik Aceh. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga pernah meminta maaf melalui Wiranto dan BJ. Habibie atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat militer dan para pendahulunya selama bertugas di Aceh. Permintaan tersebut dilakukan atas dasar konflik Aceh yang berlangsung lebih kurang 30 tahun. Selama konflik Aceh, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti pembunuhan, penculikan atau penghilangan, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan. Tidak hanya itu, konflik juga berdampak pada kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.¹

¹ Baca lebih lanjut dalam Al-Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, and Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) Di Aceh, 1989-1998*, Cet. 5. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

Kasus permintaan maaf oleh pemerintah dan juga respons korban konflik yang sekarang menjadi aktivis perempuan di Aceh menarik untuk dikaji. Penelitian akan berfokus pada aktivis perempuan Aceh yang menyaksikan peristiwa konflik sekaligus menjadi pejuang di dalamnya. Melalui pendekatan psikologi dengan kerangka teori *forgiveness* (pemaafan), peneliti hendak menyelidiki bagaimana jenis pemaafan yang diberikan oleh perempuan Aceh dalam merespons permintaan maaf dari pemerintah. Selain itu, peneliti juga hendak menggali aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi pemaafan pada perempuan Aceh tersebut.

Beberapa sarjana telah melakukan penelitian terkait pemaafan dalam konteks konflik Aceh. Penelitian Hafnidar dkk. melihat bahwa pemaafan dapat dijadikan sebagai mediasi antara aspek spiritual dan pertumbuhan psikologis korban konflik.² Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Yuandini dkk. yang menunjukkan bahwa, para korban pemerkosaan konflik Aceh sama sekali tidak memberikan pemaafan kepada para pelaku.³ Selain itu, tren kajian pemaafan di Indonesia juga berfokus pada tema-tema di luar konflik makro, seperti pemaafan berbasis budaya,⁴ pemaafan dalam konteks problem rumah tangga,⁵ hingga pemaafan pada narapidana wanita.⁶

Berbagai penelitian di atas masih berfokus pada relasi antara pemaafan, agama, dan kondisi psikologis korban konflik Aceh secara luas. Adapaun penelitian yang berfokus pada korban konflik perempuan Aceh masih terbatas pada korban pemerkosaan, bukan pada aktivis perempuan yang berjuang di tengah-tengah konflik. Dengan demikian, penelitian ini hendak mengisi kekosongan tersebut, yaitu untuk melihat jenis pemaafan yang diberikan dan aspek-aspek yang mempengaruhi pemaafan yang mereka berikan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *life story*. Kim Etherington mengatakan bahwa, pendekatan *life Story* adalah suatu pendekatan yang

1999); Al- Chaidar and Tim Peduli Tapol, *Bencana Kaum Muslimin Di Indonesia, 1980-2000*, trans. Mohammad Thalib, Cet.V. (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000).

² Hafnidar Hafnidar, L. Chang, and H. Lin, "Forgiveness as a Mediator for the Relationship between Spirituality and Posttraumatic Growth in Aceh Conflict Victims, Indonesia," *International Journal of Social Science and Humanity* 2, no. 3 (2013): 237–241.

³ Yuandini Ariefka, Kartika Sari, and Nucke Yulandari, "Memaafkan Pelaku Perkosaan Di Masa Konflik: Perjalanan Panjang Korban Konflik Di Aceh" 1, no. 2 (2018): 26.

⁴ Martinus Suharsono and Dp Budi Susetyo, "Karakteristik Pemaafan Berbasis Budaya Jawa," *PSIKODIMENSLA* 16, no. 1 (July 4, 2017): 81.

⁵ I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi and Nurul Hartini, "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (2017): 51–62; Kartika Sari, "Forgiveness pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami" 11, no. 1 (2012): 50–58.

⁶ Raudatussalamah dan Reni Susanti, "Pemaafan (Forgiveness) Dan Psychological Wellbeing Pada Narapidana Wanita," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 13, no. 2 (2016): 219–234.

dapat membantu seorang peneliti untuk memahami bagaimana seseorang menafsirkan peristiwa masa lalu, nilai-nilai, kepercayaan dan pengalaman sehingga seorang individu atau masyarakat dapat menciptakan suatu perubahan dalam hidup.⁷ Dengan pendekatan tersebut, penulis dapat mengumpulkan informasi dari aktivis perempuan Aceh terkait pengalaman hidup serta persepsi mereka dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pemaafan pada aktivis perempuan Aceh terhadap konflik. Selain itu, data-data penelitian juga diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa aktivis perempuan Aceh dan dianalisis dengan teori pemaafan.

GENDER DAN PEMAAFAN

Kajian tentang pemaafan mulai berkembang pada akhir tahun 1980-an dengan objek penelitian yang masih terbatas pada komunitas Kristen di negara Barat. Memasuki tahun 1990-an, para sarjana dari berbagai latar belakang keilmuan seperti agama, filsafat, politik, dan psikologi mulai mengkaji tentang pemaafan. Adapun kajian tentang pemaafan dengan pendekatan psikologi dipengaruhi oleh pernyataan seorang filsuf Inggris kontemporer yaitu Joanna North yang mengatakan bahwa:

*What we must remember is that a correct conception of forgiveness does not require that we forgo punishment altogether or that we should, in forgiving, attempt to annul the existence of the wrong done. Forgiveness does not remove the fact or event of wrong doing but instead relies upon the recognition of wrong having been committed in order for the process of forgiveness to be made possible.*⁸

Charles Griswold juga menyampaikan hal yang sama, di mana pemaafan adalah keutamaan moral. Akan tetapi hal ini tidak menafikan bahwa akan ada kemungkinan buruk yang terjadi di masa mendatang. Artinya, pengakuan kemanusiaan saja tidak akan menyelesaikan atau mencukupi sebuah pemaafan. Begitu pula sebaliknya, tidak memaafkan juga tidak berarti telah terjadi kelunturan dalam hal kemanusiaan atau telah melanggar moral.⁹

Pemahaman berbeda terhadap pemaafan disampaikan oleh beberapa sarjana. Seperti Michael E. McCullough dkk, yang memaknai pemaafan sebagai motivasi seseorang untuk tidak menuntut balas terhadap pelaku dengan cara menjauhinya. Akan tetapi, ada keinginan

⁷ Kim Etherington, "Life Story Research: A Relevant Methodology for Counsellors and Psychotherapists," *Counselling and Psychotherapy Research* 9, no. 4 (December 2009): 225–233.

⁸ Joanna North, "The "Ideal" of Forgiveness: A Philosopher's Exploration," Robert D. Enright and Joanna North, eds., *Exploring Forgiveness* (Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1998), 17.

⁹ Charles L. Griswold, "Forgiveness: A Philosophical Exploration," *Cambridge University Press* (2007): 93–94.

untuk berbuat baik dan berdamai dengan pelaku.¹⁰ Menurut McCullough, kepribadian orang-orang yang memaafkan pelanggaran cenderung lebih menyenangkan dan stabil dalam hal emosi dan spiritual..¹¹ Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmed dan Braithwaite yang menyatakan bahwa, perilaku memaafkan adalah respons positif terhadap tindakan pelanggaran.¹²

Everett L. Worthington memetakan model pemaafan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan intrapersonal dan pendekatan interpersonal. Model pemaafan intrapersonal terjadi pada level subjektif seseorang yang menjadi korban atas pengalaman menyakitkan yang disebabkan oleh suatu pelanggaran di masa lalu. Sedangkan dalam model pemaafan interpersonal, dunia intra psikis tersebut akan dilihat sebagai realitas yang selalu berkaitan atau bahkan ditentukan oleh perilaku-perilaku yang lain di luar dirinya.¹³

Pada tahap selanjutnya, pemetaan di atas dikembangkan oleh beberapa sarjana seperti Roy F. Baumeister, Julie J. Exline, dan Kristin L. Sommer dengan cara menyilangkan dua model pendekatan pemaafan sehingga melahirkan empat bentuk pemaafan, yaitu pemaafan palsu, pemaafan diam-diam, pemaafan total, dan tiada pemaafan.¹⁴ Pertama, pemaafan palsu adalah pemaafan yang melibatkan tindakan interpersonal tapi tidak didahului dan diikuti oleh pemaafan intrapersonal. Kedua, pemaafan diam adalah pemaafan yang terjadi hanya terjadi pada dimensi intrapersonal tanpa melibatkan dimensi interpersonal. Artinya proses penyembuhan luka telah terjadi pada dalam diri korban, namun tidak dilakukan usaha untuk memperbaiki hubungan dengan pihak pelanggar. Ketiga, pemaafan total adalah pemaafan yang terjadi pada dimensi intrapersonal dan dimensi interpersonal. Artinya korban sudah mempunyai komitmen untuk menyembuhkan luka batinnya, sehingga ia mampu memperbaiki hubungan dengan pelanggar yang berusaha meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Dalam konteks ini pemaafan tidak lagi bersifat individual, tetapi sudah bertransformasi menjadi tindakan sosial. Keempat, tanpa pemaafan adalah pemaafan yang

¹⁰ Michael E. McCullough, Everett L. Worthington, and Kenneth C. Rachal, "Interpersonal Forgiving in Close Relationships," *Journal of Personality and Social Psychology* 73, no. 2 (n.d.): 321–336.

¹¹ Michael E. McCullough, "Forgiveness: Who Does It and How Do They Do It?," *Current Directions in Psychological Science* 10, no. 6 (December 2001): 194–197.

¹² Eliza Ahmed and Valerie Braithwaite, "Forgiveness, Reconciliation, and Shame: Three Key Variables in Reducing School Bullying," *Journal of Social Issues* 62, no. 2 (June 2006): 347–370.

¹³ Pemaafan intrapersonal melahirkan lima model pemaafan yaitu Model Pembiasaan Klasik (Worthington), Model Berbasis Keputusan (Frederick DiBlasio), Model Kognitif (Thomson, dkk), Model Proses (Robert D. Enright), Model Berpusat Pada Emosi (Wanda Malcom dan Leslie Greenberg). Sedangkan pemaafan interpersonal melahirkan tiga model yaitu Model Hubungan Dua Dimensi (Roy F. Baumeister dkk), Model Empat Tahap Pemaafan (Terry D. Hargrave dan James N. Sell) dan Model Teori Interdependensi (Caryl E. Rusbult dkk). Baca lebih lanjut dalam Everett L. Worthington, *Forgiveness and Reconciliation: Theory and Application* (New York: Routledge, 2006): 18–24.

¹⁴ Roy F. Baumeister dkk, "the victim role, grudge theory, and two dimensions of forgiveness", dalam Everett L. Worthington, ed., *Dimensions of Forgiveness: Psychological Research & Theological Perspectives*, Laws of life symposia series v. 1 (Philadelphia: Templeton Foundation Press, 1998), 87–90.

menggambarkan sikap korban dan pelanggar yang tidak memiliki komitmen untuk menempuh serta mencapai pemafan. Hubungan antara korban dan pelanggar ini sangat pasif serta dapat menyulut konflik yang lebih besar lagi sebab keduanya saling berada pada status waspada. Konflik di antara kedua pihak tidak sepenuhnya lenyap, tapi bersifat laten dan sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan.

Studi mengenai pemaafan terus berkembang dalam berbagai fokus keilmuan, termasuk gender. Beberapa studi tersebut dilakukan oleh Varda Konstam dkk.,¹⁵ Loren Toussant dan Jon R. Webb.,¹⁶ Michelle Cardi dkk.,¹⁷ Suzanne Freedman dan Robert D. Enright.,¹⁸ serta Andrea J. Miller.¹⁹ Hasil penelitian dengan berbagai variabel tersebut (motivasi, harga diri, marah, dan balas dendam) menunjukkan bahwa, perempuan lebih cenderung memaafkan dibandingkan laki-laki. Pearl Ghaemmaggani dkk. mengatakan bahwa, perbedaan usia dan jenis kelamin juga berpengaruh pada pemaafan terhadap suatu pelanggaran.²⁰ Perempuan dewasa dan tua lebih mudah untuk memaafkan dibandingkan dengan anak muda yang cenderung untuk melakukan balas dendam. Senada dengan hal tersebut, Catherine Romero dan David B. Mitchell juga mengatakan bahwa, perempuan Katolik Roma yang lebih tua cenderung memaafkan jika dibandingkan dengan perempuan yang lebih muda.²¹

Dari paparan di atas, penulis berpendapat bahwa pemaafan pada perempuan juga dapat berubah bukan hanya terkait gender, agama, dan usia, tetapi juga berkaitan dengan jenis konflik yang mereka alami serta kesungguhan dari pihak pelanggar dalam meminta maaf. Dengan demikian, kita tidak bisa meminggirkan faktor jenis konflik dan kesungguhan pelaku dalam meminta maaf untuk menentukan jenis pemaafan yang dihasilkan oleh para perempuan.

¹⁵ Varda Konstam, Miriam Chernoff, and Sara Deveney, "Toward Forgiveness: The Role of Shame, Guilt, Anger, and Empathy," *Counseling and Values* 46, no. 1 (October 2001): 26–39.

¹⁶ Loren Toussaint and Jon R. Webb, "Gender Differences in the Relationship Between Empathy and Forgiveness," *The Journal of Social Psychology* 145, no. 6 (December 2005): 673–685.

¹⁷ Michelle Cardi et al., "Self-Esteem Moderates the Response to Forgiveness Instructions among Women with a History of Victimization," *Journal of Research in Personality* 41, no. 4 (August 2007): 804–819.

¹⁸ Suzanne Freedman and Robert D. Enright, "The Use of Forgiveness Therapy with Female Survivors of Abuse," *Journal of Womens Health Care* 06, no. 03 (2017), accessed December 11, 2019, <https://www.omicsgroup.org/journals/the-use-of-forgiveness-therapy-with-female-survivors-of-abuse-2167-0420-1000369.php?aid=88997>.

¹⁹ Andrea J. Miller, Everett L. Worthington, and Michael A. McDaniel, "Gender and Forgiveness: A Meta-Analytic Review and Research Agenda," *Journal of Social and Clinical Psychology* 27, no. 8 (October 2008): 843–876.

²⁰ Pearl Ghaemmaggani, Mathias Allemand, and Mike Martin, "Forgiveness in Younger, Middle-Aged and Older Adults: Age and Gender Matters," *Journal of Adult Development* 18, no. 4 (December 2011): 192–203.

²¹ Catherine Romero and David B. Mitchell, "Forgiveness of Interpersonal Offenses in Younger and Older Roman Catholic Women," *Journal of Adult Development* 15, no. 2 (June 2008): 55–61.

PEREMPUAN DALAM PUSARAN KONFLIK DI INDONESIA

Hingga saat ini, perempuan masih sering menjadi korban kekerasan, baik itu di lingkungan keluarga dan masyarakat.²² Dalam pusaran konflik, kondisi perempuan sebagai korban kekerasan lebih menyedihkan lagi. Menurut *United States Agency for International Development* (USAID), perempuan sangat rentan menjadi korban ketika berada di wilayah konflik.²³ Kategorisasi perempuan-perempuan di wilayah konflik terlihat dalam peta konflik dunia seperti di negara Sierra Leone, Rwanda, dan Yugoslavia.²⁴ Perempuan-perempuan di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti peta konflik di atas. Perempuan Indonesia pada masa penjajahan banyak dijadikan sebagai penghibur atau *Jugun Ianfu* di rumah bordil untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang. Pada masa itu, perempuan yang dijadikan budak seksual tidak hanya berasal dari kelas pribumi, melainkan sampai kepada kelas bangsawan. Para perempuan tersebut diambil oleh para tentara Jepang dan ditempatkan di *kamp Ianjo*.²⁵

Perempuan juga mengalami keterpinggiran ketika kepemimpinan nasional berada di bawah rezim orde baru. Pada tahun 1965/1966, terjadi pembantaian massal terhadap mereka yang diklaim sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pengikutnya.²⁶ Pada saat yang sama, perempuan yang tergabung di organisasi Gerwani juga menjadi korban pembunuhan, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan. Perempuan di organisasi ini diklaim terlibat dalam penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965.²⁷ Menurut Saskia Wieringa, ketika peristiwa itu terjadi, yang berada di sekitar lubang buaya bukan hanya gerwani, tetapi juga para istri Prajurit Cakrabirawa dan sukarelawati yang dikerahkan oleh partai yang jumlah semuanya sekitar puluhan orang.²⁸

²² Baharuddin, "Anak Dan Perempuan Dalam Perlindungan Kekerasan Rumah Tangga," *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019): 183.

²³ Elisabeth Kvitashvili, "Women and Conflict: An Introductory Guide For Programming" (United States Agency for International Development (USAID), 2007).

²⁴ Nicole Hogg, "Women's Participation in the Rwandan Genocide: Mothers or Monsters?," *International Review of the Red Cross* 92, no. 877 (March 2010): 69–102; Rebecca Horn et al., "Women's Perceptions of Effects of War on Intimate Partner Violence and Gender Roles in Two Post-Conflict West African Countries: Consequences and Unexpected Opportunities," *Conflict and Health* 8, no. 1 (2014): 12; Lisa Sharlach, "Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda," *New Political Science* 22, no. 1 (March 2000): 89–102.

²⁵ Baca dalam buku Anna Mariana, *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang Dan Neofasisme Orde Baru*, Cetakan pertama. (Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015).

²⁶ Robert Cribb, "Genocide in Indonesia, 1965-1966," *Journal of Genocide Research* 3, no. 2 (June 2001): 219–239; Robert Cribb and Charles A. Coppel, "A Genocide That Never Was: Explaining the Myth of Anti-Chinese Massacres in Indonesia, 1965–66," *Journal of Genocide Research* 11, no. 4 (December 2009): 447–465; Geoffrey Robinson, "'Down to the Very Roots': The Indonesian Army's Role in the Mass Killings of 1965–66," *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (October 2, 2017): 465–486.

²⁷ Annie Pohlman, "Sexual Violence as Torture: Crimes against Humanity during the 1965–66 Killings in Indonesia," *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (October 2, 2017): 574–593.

²⁸ Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual Di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, trans. Harsutejo, Cet.1. (Yogyakarta: Galang Press, 2010), 420–430.

Kekerasan terhadap perempuan juga terjadi pada tahanan politik seperti yang dialami oleh para tahanan di penjara Bukit Duri Jakarta, Wirogunan Yogyakarta, dan Buru Semarang. Pada tanggal 16 Agustus 1969, mereka dikirim ke kamp pengasingan atau dikenal dengan *Kamp Tefaaf* Pelatungan di Kendal Jawa Tengah. Awalnya mereka akan direhabilitasi karena dianggap sudah menyimpang, tetapi mereka malah dijadikan sebagai budak seksual.²⁹ Pada Mei 1998 juga terjadi pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa.³⁰ Selain itu, perempuan Ahmadiyah juga mengalami kekerasan setelah kelompoknya diklaim sesat dan keluar dari ajaran mayoritas umat Islam melalui dua fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).³¹

PEREMPUAN DAN KONFLIK ACEH

Kekerasan terhadap perempuan seperti yang telah dipaparkan di atas juga terjadi terhadap perempuan Aceh selama konflik. Aceh termasuk salah satu provinsi yang memiliki sejarah konflik yang panjang di Indonesia, mulai dari konflik melawan penjajah Belanda dan Jepang hingga konflik dengan pemerintahan Indonesia sendiri. Dalam konteks konflik dengan pemerintahan pusat, perseteruan ini dimulai ketika Daud Bereueh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah atas janji yang tidak ditepati.³² Dia bergabung dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang sudah terlebih dulu melakukan perlawanan terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Kartosuwirjo.³³ Pemberontakan Daud Beureueh berhasil dihentikan setelah tercapainya negosiasi antara pemerintah pusat dan Aceh dengan syarat pemberian hak istimewa bagi Aceh dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.³⁴

Pada tanggal 4 desember 1976, konflik dengan pemerintahan pusat berulang kembali setelah didirikannya GAM oleh Hasan Tiro. Kemunculan gerakan ini merupakan respons terhadap sikap pemerintah pusat di era Soeharto yang sangat sentralistik. Selain itu, perlawanan ini juga dipicu oleh sikap Soeharto dan kelompoknya yang mengeksploitasi kekayaan sumber daya Aceh secara brutal.³⁵ Schulze menyebutkan bahwa, pada awalnya

²⁹ Baca dalam Mariana, *Perbudakan Seksual*.

³⁰ S. Sinansari Ecip, *Siapa "Dalang" Prabowo: Kronologi Situasi Merebaknya Berbagai Kerusuhan Sejak Soeharto Lengser* (Bandung: Mizan, 1999), 137.

³¹ Nina Mariani, "Ahmadiyah, Conflicts, and Violence in Contemporary Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 1 (June 1, 2013): 1–30.

³² Anthony Reid, *Sumatera: revolusi dan elite tradisional*, trans. Tom Anwar (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), 37–39.

³³ Cornelis van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Cet. IV. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 4; Hiroko Horikoshi, "The Dar Ul-Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in the Historical Process," *Southeast Asia Program Publications at Cornell University* 20 (October 1975): 58.

³⁴ Shane Joshua Barter, "Ulama, the State, & War: Community Islamic Leaders in the Aceh Conflict," *Contemporary Islam* 5, no. 1 (April 2011): 19–36.

³⁵ Untuk mendapat pemahaman secara jelas tentang gerakan tersebut, silahkan baca buku Murizal Hamzah, *Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, ed. M. Adli Abdullah, Cet.1. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2014), 12. Husaini Muhammad Hasan, *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm: Catatan Dr. Husaini M. Hasan, Sp. OG. Ketika Bersama Dr. Tengku*

gerakan ini terdiri dari beberapa orang dari berbagai latar belakang profesi seperti dokter, mekanik, akademisi, pembisnis, hingga pengusaha. Gerakan ini mulai mendapatkan banyak pengikut ketika beberapa anggotanya pulang dari latihan militer di Libya dan ketika rezim Soeharto mulai jatuh dari puncak kekuasaan. Pada kondisi tersebut –era kejatuhan Soeharto– mereka memanfaatkan kesempatan untuk merekrut anggota baru, termasuk nanti yang akan bergabung adalah *Inong Balee* atau dikenal sebagai perempuan kombatan.³⁶

Pada awalnya, kemunculan gerakan tersebut langsung direspons oleh pemerintah Pusat dengan mengirim aparat militer untuk segera melakukan penertiban. Pendekatan yang lebih represif dilakukan antara tahun 1989-1998 dengan menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM). Namun, status tersebut dicabut ketika rezim Soeharto jatuh dari puncak kepemimpinan nasional setelah berkuasa selama 32 tahun.³⁷ Pasca reformasi, ada usaha untuk menyelesaikan konflik Aceh seperti Jeda Kemanusiaan (*Humanitarian Pause*) pada tahun 2000-2001, juga negosiasi lainnya yang dikenal dengan *Ceasation of Hostilities Agreement* (CoHA) pada tahun 2002. Kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak berlangsung lama sebab kekerasan masih banyak terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya saling tuduh-menuduh di antara kedua belah pihak dan berujung pada pemenjaraan para negosiator GAM.³⁸ Akibatnya, pada Mei 2003, Megawati Soekarno Putri menetapkan Aceh dengan status Darurat Militer (DM) dan menjadi operasi militer yang paling besar efeknya.³⁹ Konflik antara Aceh dan pemerintah Indonesia berakhir pada 15 Agustus 2005 setelah dimediasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari di Finlandia.⁴⁰

Konflik yang berkepanjangan di atas telah menjadikan banyak perempuan di Aceh sebagai objek kekerasan, pembunuhan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.⁴¹ Meskipun konflik yang berkepanjangan itu begitu merugikan perempuan, masih ada beberapa perempuan Aceh yang berusaha mendampingi korban, menyuarakan pencabutan status operasi militer, dan juga menginisiasikan jalan damai dalam penyelesaian konflik Aceh. Asmaul Husna, seorang aktivis perempuan Aceh menyampaikan ketika itu banyak organisasi,

Hasan M. Di Tiro, B.S., M.A., Ph.D., LL.D., *Proklamator Aceh Merdeka*, Cetakan pertama. (Jakarta: Batavia Publishing, 2015).

³⁶ Kirsten E. Schulze, "The Struggle for an Independent Aceh: The Ideology, Capacity, and Strategy of GAM," *Studies in Conflict & Terrorism* 26, no. 4 (July 2003): 241–271; Kirsten E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization* (East-West Center, 2004), 14.

³⁷ Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM)*, 19.

³⁸ Edward Aspinall et al., *The Aceh Peace Process Why It Failed* (Washington, DC: East-West Center Washington, 2003), 14–26.

³⁹ Michael Morfit, "The Road To Helsinki: The Aceh Agreement and Indonesia's Democratic Development," *International Negotiation* 12, no. 1 (2007): 111–143.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh*, 1st ed. (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000), 16.

seperti Forum Komunikasi Mahasiswi Aceh (FKMA), Solidaritas Mahasiswa Aceh Rakyat (SMAR), Solidaritas Mahasiswi Islam Peduli Aceh (SMIPA), Solidaritas Perempuan untuk Referendum Aceh (SPURA), Front Aksi Reformasi Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Aceh (FARMIDIA), serta ada juga gerakan yang berada di luar Aceh seperti Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang ikut mendesak pemerintah untuk mencabut operasi militer di Aceh.⁴²

Jatuhnya Soeharto telah membuka ruang baru bagi pergerakan aktivis perempuan secara nasional, termasuk aktivis perempuan Aceh. Awalnya pergerakan perempuan dikontrol oleh pemerintah melalui dua organisasi perempuan yaitu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita⁴³. Keterbukaan ruang bagi aktivis perempuan pasca jatuhnya Soeharto justru dimanfaatkan oleh aktivis perempuan Aceh untuk menjalankan misi kemanusiaan. Pada tahun 1990, Aktivis perempuan Aceh bersama beberapa mahasiswa pergi ke wilayah yang rentan terjadi konflik seperti Aceh Timur, Julok, Kota Binje, Perlak, Idi Rayek, serta Idi Cut untuk mengantarkan bantuan logistik, penguatan psikologis, pendidikan umum dan agama bagi anak-anak di barak pengungsian.⁴⁴ Selain bantuan logistik, aktivis perempuan Aceh juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara investigasi dan pemantauan kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer agar dapat dicatat dan kemudian dilaporkan kepada mereka.⁴⁵

Selain melakukan penguatan ekonomi, aktivis perempuan juga berusaha mencari solusi atas konflik Aceh. Mereka mengadakan kongres akbar *Duek Pakat Inong Aceh* (DPIA) dengan tema yang diusung adalah *Krue Semangat Ureung Inong Aceh Bak Duek Pakat Aceh Aman dan Damai* (Semangatlah Perempuan Aceh dalam Musyawarah Aceh Aman dan Damai). Suraiya Kamaruzzaman mengatakan bahwa damai dalam acara tersebut bukan berarti menyerah dengan menghilangkan fakta pelanggaran HAM di Aceh, tetapi perdamaian dengan jalan tidak ada lagi perang di Aceh (Suraiya Kamaruzzaman, 2019). Eka Srimulyani juga mengatakan bahwa, dalam skala yang lebih luas, beberapa aktivis perempuan ikut menyampaikan fakta konflik Aceh ke hadapan dunia internasional seperti lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ke beberapa negara Eropa.⁴⁶

⁴² Wawancara dengan Asmaul Husna pada tanggal 26 Februari di Solong Ulee Kareng.

⁴³ Suzanne Brenner, "On the Public Intimacy of the New Order: Images of Women in the Popular Indonesian Print Media," *Cornell University Press; Southeast Asia Program Publications at Cornell University* 67 (April 1999): 13–37.

⁴⁴ Wawancara dengan Rahmatan pada tanggal 27 Februari 2019 di Solong Premium, Beurawe.

⁴⁵ Wawancara dengan Suraiya Kamaruzzaman pada tanggal 12 Maret 2019 di rumah pribadi, Banda Aceh.

⁴⁶ Eka Srimulyani, "Islam, Perempuan Dan Resolusi Konflik Di Aceh (2000 – 2005)," *Jurnal Analisis* XII, no. 2 (2012): 20.

Ihwal di atas menunjukkan bahwa aktivis perempuan Aceh sudah mulai aktif melakukan misi kemanusiaan sejak awal konflik Aceh terjadi. Pasca jatuhnya Soeharto, ruang yang semakin terbuka justru membuat pergerakan aktivis perempuan Aceh semakin masif dan terorganisir. Mereka mulai aktif memberikan penguatan ekonomi secara mandiri maupun atas bantuan dunia internasional, mengajarkan dasar-dasar investigasi terhadap tindakan kekerasan dan pembunuhan, serta menginisiasi dialog damai untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Hal ini membuktikan bahwa perempuan di wilayah konflik tidak selalu menjadi kelompok yang terdiskriminasi, tetapi mereka justru menjadi kelompok terdepan yang mampu melakukan negosiasi dengan berbagai pihak di tengah-tengah konflik.

AKTIVIS PEREMPUAN ACEH DAN NARASI PEMAAFAN

Kekerasan terhadap masyarakat Aceh, khususnya perempuan berlangsung selama lebih kurang 30 tahun. Sejak Pemerintah Indonesia melakukan tindakan represif terhadap kelompok GAM dengan penetapan Aceh sebagai DOM pada tahun 1989-1998 dan DM pada tahun 2003, telah banyak terjadi pelanggaran HAM di Aceh, termasuk kepada aktivis perempuan Aceh yang bekerja untuk isu-isu kemanusiaan. Selain mendapat perlakuan diskriminatif selama konflik, mereka juga menghadapi berbagai persoalan baru seperti kesulitan dalam akses ekonomi, termarginalkan pada pertarungan politik, mendapatkan stigma negatif, dan menjadi korban diskriminasi dari penerapan syariat Islam. Di saat suara perempuan begitu diperlukan di era reformasi dan demokratisasi seperti saat ini,⁴⁷ ketidakberdayaan perempuan dalam ruang publik –termasuk dunia politik– akibat konflik malah membuat cita-cita tersebut semakin sulit untuk tercapai.

Subbab ini akan membahas narasi pemaafan yang berdasarkan pada pengalaman aktivis perempuan Aceh selama konflik. Narasi-narasi pemaafan yang disampaikan oleh para aktivis perempuan akan memperlihatkan bentuk pemaafan yang mereka berikan. Adapun narasi-narasi pemaafan yang disampaikan oleh aktivis perempuan Aceh terhadap konflik adalah sebagai berikut:

1. Suraiya Kamaruzzaman

Suraiya kamaruzzaman lahir 3 juni 1968 di Desa Lam Ue, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Setelah tamat SMA (Sekolah Menengah Atas), dia mengambil pendidikan tinggi S1 di Jurusan Teknik Kimia, dan melanjutkan S2 di sekolah *Human Right*,

⁴⁷ Fathurrosi, “Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur’an),” *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2018): 125.

Hongkong. Setelah menempuh pendidikan di Hongkong, ia menjadi pengajar di Unsyiah dan mengambil gelar magister di bagian Teknik Kimia karena tuntutan administrasi.

Selama menjadi aktivis kemanusiaan dalam konflik Aceh, ia memang tidak pernah mengalami kekerasan secara fisik. Meskipun demikian, ia kerap kali mendapatkan ancaman yang mengerikan, mulai dari ancaman pembomban pada kantor yang ia tempati, ancaman melalui surat kaleng, dimasukkan dalam daftar tembak, hingga pemasangan bendera GAM di kantornya dengan tujuan provokasi. Semua ini membuat dirinya mengalami tekanan psikologis yang begitu berat. Keluhan dan pengaduan dari korban konflik yang ia dengar di lapangan semakin menambah kondisi traumatis di dalam dirinya. Awalnya ia tidak begitu menghiraukan kondisi psikologisnya. Hingga akhirnya, ketika ia mendatangi seorang psikolog, ia baru menyadari bahwa kondisi psikologisnya benar-benar dalam keadaan yang bermasalah.

Dalam hal pemaafan, ia membuka ruang untuk memberi maaf karena menurutnya hal itu adalah bentuk dari sebuah kebaikan. Keyakinan ini tumbuh dalam dirinya karena sedari kecil ia sudah diajarkan untuk saling memaafkan melalui cerita-cerita agama. Dari sumber tersebut, ia mendapati bahwa orang yang mau memaafkan adalah orang yang baik. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh McCullough dan Worthington bahwa, nilai-nilai agama mempunyai konektivitas dengan pemaafan yang dilakukan oleh seseorang.⁴⁸

Hanya saja, kebersediaan ia untuk memberikan maaf terkadang mulai luntur ketika ia melihat dan mengingat korban konflik di masa lalu. Hal ini membuat ia tidak bisa lupa akan fakta-fakta yang sudah terjadi. Tarik ulur ini kemudian membuatnya mau untuk memaafkan asalkan hak-hak korban dan beban psikologis serta materiil diperhatikan, khususnya bagi korban pemerkosaan.

Pemaafan yang disampaikan oleh Suraiya memiliki hubungan dengan filosofi pemaafan yang disampaikan oleh Jonna North. North menyebutkan bahwa pemaafan yang diberikan kepada para pelanggar atau kepada pelaku, dalam hal ini kasus konflik Aceh, bukanlah jenis pemaafan yang hendak melupakan secara total kasus pelanggaran yang sudah terjadi. Pengakuan akan pelanggaran dari pelaku harus tetap dilaksanakan agar pemaafan yang tulus bisa tercapai. Pemaafan dalam bentuk ini hendak menghilangkan efek kerusakan dari suatu pelanggaran.⁴⁹

⁴⁸ Michael E. McCullough and Everett L. Worthington, Jr., "Religion and the Forgiving Personality," *Journal of Personality* 67, no. 6 (December 1999): 1141–1164.

⁴⁹ Enright and North, *Exploring Forgiveness*, 18.

2. Khairani Arifin

Khairani Arifin adalah seorang aktivis perempuan yang menghabiskan masa kecilnya di Aceh Utara. Daerah tersebut merupakan kawasan yang sangat rentan dengan konflik, sehingga membuat orang tuanya terpaksa memasukkan dirinya ke sekolah yang berada dekat dengan perkotaan agar kondisinya lebih aman. Sekarang ia bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsyiah, Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Unsyiah dan Ketua Presidium *Balai Syura Ureng Inong Aceh*.⁵⁰

Selama menjadi relawan kemanusiaan, Khairani pernah ditangkap dan dipukul oleh oknum polisi. Pada saat itu, dia beserta kawannya sedang melakukan pendampingan untuk korban pengungsian, membantu ibu-ibu hamil, dan memberikan pendidikan untuk anak-anak dan orang tua. Akan tetapi, bagi oknum polisi, kegiatan dan fasilitas yang mereka berikan kepada para pengungsi justru dianggap penyebab betahnya para pengungsi di barak tersebut. Mereka kemudian dipukul dengan rol dan dicaci dengan kata-kata *lonte* (pelacur).

Selain itu, trauma berat lainnya yang ia rasakan adalah ketika melakukan pendampingan terhadap masyarakat di Tiro Pidie. Saat itu, wilayah Tiro sedang terjadi aksi pembakaran oleh aparat militer. Ketika ia dan rekan-rekannya datang ke sana, ia langsung mendapati para masyarakat yang tengah menggali bekas pembakaran untuk mengeluarkan mayat-mayat yang tertimbun di dalamnya. Ketika para tentara sudah meninggalkan kawasan tersebut, seorang anak perempuan datang menghampirinya dan menceritakan bahwa ibunya juga terbakar bersama rumah mereka. Kejadian ini begitu membekas di dalam dirinya sehingga membuat ia tidak bisa tidur dengan tenang selama satu bulan karena selalu terbayang akan peristiwa tersebut.

Akibat kejadian tersebut, Khairani sempat *diruqyah*. Merasa tidak berhasil, ia kemudian pergi ke psikolog. Ia disarankan oleh psikolog untuk melupakan kejadian-kejadian tersebut dengan cara memikirkan hal-hal yang menyenangkan, membaca novel, hingga disarankan untuk pergi liburan. Khairani benar-benar pergi berlibur ke Belanda untuk melupakan kejadian tersebut. Sayangnya, ia masih saja teringat dengan masyarakat Aceh sehingga memutuskan segera untuk segera kembali. Seiring berjalannya waktu, ia mulai mampu melupakan sedikit kejadian tersebut. Ia juga mengambil pelajaran dari semua kejadian ini dengan cara bersyukur atas kehidupan yang ia miliki saat ini. Ia

⁵⁰ Wawancara dengan Khairani Arifin pada tanggal 20 maret 2019 di kantor Balai Syura Ureung Inong Aceh.

bersyukur bahwa dirinya bukanlah korban konflik saat itu. Ia merasa beruntung masih bisa bekerja dan anak-anaknya bisa bersekolah.

Khairani mengatakan dengan tegas bahwa pemaafan baru bisa diberikan bila sudah ada pengakuan. Selama pelaku tidak meminta maaf, maka pelanggaran itu tidak bisa dimaafkan. Dalam konteks konflik Aceh, mereka yang tidak bisa dimaafkan adalah mereka yang tidak mengakui adanya kejadian pelanggaran saat konflik dan mereka yang tidak menyampaikan permintaan maaf setelah kejadian. Kathleen Gill seorang ahli filsafat moral dari Amerika menyebutkan bahwa, ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemaafan, yaitu status pelanggaran; kepastian siapa pelaku dan korban; pemohon dan memberi maaf; tanggung jawab; pemulihan kepercayaan dan harapan setelah pelanggaran.⁵¹ Pengakuan dan permohonan maaf yang dikehendaki oleh Khairani merupakan pintu masuk untuk sampai pada kelima syarat tersebut. Jika pengakuan belum disampaikan, maka tertutup kemungkinan untuk masuk ke tahap selanjutnya dan tertutup kemungkinan untuk mendapatkan pemaafan dari korban konflik.

3. Asmaul Husna

Husna adalah aktivis perempuan Aceh yang lahir di Tangse Pidie pada tanggal 4 Juli 1978. Perlakuan intimidasi sudah dirasakan oleh keluarganya sejak beberapa generasi sebelum Asmaul Husna. Keluarganya yang berasal dari golongan *ulee balang* (dapat dikenali dengan sebutan *Teuku* bagi laki-laki dan *Cut* bagi perempuan) pernah mengalami peristiwa revolusi sosial atau lebih dikenal dengan “Perang Cumbok”.⁵² Kakeknya yang masih termasuk golongan *ulee balang* membuat keluarga ini harus mengasingkan diri ke daerah Tangse. Padahal secara strata sosial kakeknya masih termasuk dalam golongan ulama dengan mendapat gelar *Teungku* (Kyai). Peristiwa Perang Cumbok ketika itu menyebabkan orang-orang yang memiliki nama *Teuku* menjadi incaran dan rentan mengalami kekerasan, dan pada waktu itu kakeknya menjadi korban dari peristiwa tersebut.

Asmaul Husna sudah bersentuhan dengan isu konflik sejak tahun 1983. Pada waktu itu kondisi konflik memang masih tidak terlalu bergejolak. Hanya saja, narasi-narasi yang berkaitan dengan “Aceh Merdeka” sudah sering diterimanya dalam percakapan sehari-hari. Baru setelah tahun 1989, dia mulai dekat dengan isu-isu GAM dan seruan-seruan kemerdekaan dari Hasan Tiro. Mulai saat itu, ia kerap menyaksikan secara langsung

⁵¹ Kathleen Gill, “The Moral Functions of an Apology,” *The Philosophical Forum* 31, no. 1 (March 2000): 11–27.

⁵² M.Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Bereueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung, 1986), 92–114.

kekerasan dan kebrutalan oleh para aparat. Ia pernah melihat mayat di pasar Beureunun Pidie yang mati ditembak karena dituduh sebagai anggota GAM.

Selama menjadi mahasiswi, dia aktif dalam misi kemanusiaan di Aceh. Ia mendampingi pengungsi daerah Julok Aceh Timur, mengevakuasi mayat, terlibat dalam proses rekonsiliasi antara suku Gayo, Jawa, dan Aceh di Takengon. Ia juga pernah mengantar bantuan logistik ke salah satu daerah yang baru saja digempur oleh TNI dengan pengawalan prajurit bersenjata lengkap di daerah Kuala Malihan, Simpang Ulim Aceh Timur.

Selama menjadi aktivis, ia memang tidak pernah mengalami kekerasan fisik. Akan tetapi, ia pernah merasakan pengalaman pahit seperti ditangkap atas tuduhan sebagai anggota *Inong Balee*. Ia pernah dipanggil ke kantor polisi dan harus mengasingkan diri ke Thailand karena hendak dijadikan saksi dan tersangka dalam kasus konflik. Hal ini terjadi karena ia dianggap telah membela kelompok GAM dengan cara menyelamatkan dokumen-dokumen mereka. Semua peristiwa yang pernah dialaminya ini membuat ia tertekan secara psikologis. Bahkan ia mengaku kerap menanis sendiri bila mengingat kejadian-kejadian tersebut.

Dalam kasus pemaafan, Husna memandang bahwa ada tiga hal yang ia yakini terkait pemaafan. Pertama, ia mengatakan bahwa jika negara tidak mengakui kesalahannya dalam konflik Aceh, maka pemaafan tidak bisa diberikan. Kedua, pemaafan akan sangat mungkin untuk diberikan bila pelaku melakukan pengakuan secara individu. Ketiga, pelaku yang meminta maaf, para korban juga ada yang langsung memberikan maaf karena masyarakat menganggap bahwa memberi maaf merupakan anjuran dalam Islam.

Pemaafan yang disampaikan oleh Husna sangat kompleks, dia mengatakan tidak bisa memaafkan jika konflik tersebut telah merusak sistem lama –agama, sosial, dan budaya– yang sudah mapan di Aceh. Griswold menyebutkan bahwa, apabila masih ada orang-orang yang beranggapan terdapat jenis-jenis pelanggaran yang dianggap melampaui batas nalar kemanusiaan, maka pelanggaran tersebut tidak termaafkan, meskipun ada kondisi di mana memungkinkan pemaafan tersebut dicapai.⁵³ Pada sisi yang lain, Husna mengatakan bahwa pemaafan mungkin tercapai jika pernyataan permintaan maaf disampaikan dan korban juga

⁵³ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice: Diskursus Perihal di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Cetakan I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 20; Griswold, "Forgiveness: A Philosophical Exploration," 91.

memaafkan. Dalam hal ini, pemaafan akan diberikan jika hubungan hubungan intrapersonal dan intrapersonal telah tercapai.⁵⁴

Berdasarkan narasi pemaafan yang disampaikan oleh aktivis-aktivis perempuan Aceh, kemudian dihubungkan dengan model pemaafan hubungan dua dimensi, maka jenis pemaafan yang diberikan akan lebih dekat dengan tipe pemaafan total. Pemaafan total sebagaimana yang dimaksudkan Baumeister, menghendaki tercapainya pemaafan di tingkat intrapersonal dan interpersonal. Pada kasus aktivis perempuan Aceh, jika kita perhatikan lebih dalam lagi lewat narasi yang mereka sampaikan, aktivis perempuan Aceh telah tampak memaafkan secara intrapersonal. Nilai-nilai yang diajarkan dalam agama (orang yang baik adalah orang yang mau memaafkan) dan keinginan untuk melihat kehidupan yang lebih baik ke depannya merupakan pendorong adanya pemberian maaf jenis tersebut. Adapun pada tahap interpersonal, sudah terlihat adanya langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak pelanggar atau pemerintah untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi selama konflik Aceh. Dengan demikian, penggunaan model pemaafan dua dimensi dengan tipe pemaafan total tampak telah tercapai.

Akan tetapi, pemaafan tampak belum benar-benar diberikan ketika para aktivis di atas masih menuntut pemenuhan hak-hak perempuan Aceh yang menjadi korban konflik, terutama korban pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perempuan kombatan yang hak-haknya belum terpenuhi sama sekali. Hal ini membuat peneliti yakin untuk menarik kesimpulan bahwa, tipe pemaafan terhadap konflik Aceh adalah termasuk tipe pemaafan bersyarat. Pemaafan bersyarat yang dilakukan oleh aktivis perempuan Aceh dipengaruhi oleh tiga hal utama, yaitu nilai-nilai agama, interaksi sosial, dan persoalan yang berhubungan dengan hak-hak korban. Tipe pemaafan bersyarat yang penulis maksudkan adalah suatu bentuk pemaafan dengan syarat-syarat tertentu yang baru disepakati atau terjadi jika hak-hak korban konflik terpenuhi sepenuhnya.

KESIMPULAN

Berbagai kesenjangan yang dialami oleh aktivis perempuan Aceh dari masa konflik hingga pasca perdamaian terkadang dipandang oleh mereka melalui kaca mata agama dan keinginan untuk melihat kehidupan yang damai. Kedua faktor itulah yang membuat mereka berkenan untuk memberikan pemaafan. Hanya saja, pengalaman traumatis di masa lalu dan persoalan hak-hak korban konflik yang belum terpenuhi membuat mereka bersedia memberikan pemaafan yang bersyarat.

⁵⁴ Worthington, *Forgiveness and Reconciliation*, 18–24.

Peneliti menyadari ada banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk para peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat lebih menfokuskan pada perempuan akar rumput (sipil) yang menjadi korban konflik. Hal tersebut belum tersentuh dan dielaborasi dalam penelitian yang sudah dilakukan. Kedua, penelitian tentang pemaafan terhadap konflik Aceh juga dapat difokuskan lebih mendalam terhadap para perempuan kombatan (*Inong Balee*). Ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat memfokuskan diri terhadap pemaafan dari para elit kombatan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Afthonul. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice: Diskursus Perihal di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ahmed, Eliza, and Valerie Braithwaite. "Forgiveness, Reconciliation, and Shame: Three Key Variables in Reducing School Bullying." *Journal of Social Issues* 62, no. 2 (June 2006): 347–370.
- Al-Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, and Yarmen Dinamika. *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) Di Aceh, 1989-1998*. Cet. 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Ariefka, Yuandini, Kartika Sari, and Nucke Yulandari. "Memaafkan Pelaku Perkosaan Di Masa Konflik: Perjalanan Panjang Korban Konflik Di Aceh" 1, no. 2 (2018): 26.
- Aspinall, Edward, Harold Crouch, East-West Center Washington, and Project on Internal Conflicts. *The Aceh Peace Process Why It Failed*. Washington, DC: East-West Center Washington, 2003.
- Baharuddin. "Anak Dan Perempuan Dalam Perlindungan Kekerasan Rumah Tangga." *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019).
- Barter, Shane Joshua. "Ulama, the State, & War: Community Islamic Leaders in the Aceh Conflict." *Contemporary Islam* 5, no. 1 (April 2011): 19–36.
- Brenner, Suzanne. "On the Public Intimacy of the New Order: Images of Women in the Popular Indonesian Print Media." *Cornell University Press; Southeast Asia Program Publications at Cornell University* 67 (April 1999): 13–37.
- Cardi, Michelle, Richard Milich, Monica J. Harris, and Evan Kearns. "Self-Esteem Moderates the Response to Forgiveness Instructions among Women with a History of Victimization." *Journal of Research in Personality* 41, no. 4 (August 2007): 804–819.
- Chaidar, Al-, and Tim Peduli Tapol. *Bencana Kaum Muslimin Di Indonesia, 1980-2000*. Translated by Mohammad Thalib. Cet.V. Yogyakarta: Wihdah Press, 2000.
- Cribb, Robert. "Genocide in Indonesia, 1965-1966." *Journal of Genocide Research* 3, no. 2 (June 2001): 219–239.
- Cribb, Robert, and Charles A. Coppel. "A Genocide That Never Was: Explaining the Myth of Anti-Chinese Massacres in Indonesia, 1965–66." *Journal of Genocide Research* 11, no. 4 (December 2009): 447–465.

- Dijk, Cornelis van. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Cet. IV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Ecip, S. Sinansari. *Siapa "Dalang" Prabowo: Kronologi Situasi Merebaknya Berbagai Kerusuhan Sejak Soebarto Lengser*. Bandung: Mizan, 1999.
- El Ibrahimy, M.Nur. *Teungku Muhammad Daud Bereueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Enright, Robert D., and Joanna North, eds. *Exploring Forgiveness*. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1998.
- Etherington, Kim. "Life Story Research: A Relevant Methodology for Counsellors and Psychotherapists." *Counselling and Psychotherapy Research* 9, no. 4 (December 2009): 225–233.
- Fathurrosi. "Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur'an)." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2018).
- Freedman, Suzanne, and Robert D Enright. "The Use of Forgiveness Therapy with Female Survivors of Abuse." *Journal of Womens Health Care* 06, no. 03 (2017). Accessed December 11, 2019. <https://www.omicsgroup.org/journals/the-use-of-forgiveness-therapy-with-female-survivors-of-abuse-2167-0420-1000369.php?aid=88997>.
- Ghaemmaghani, Pearl, Mathias Allemand, and Mike Martin. "Forgiveness in Younger, Middle-Aged and Older Adults: Age and Gender Matters." *Journal of Adult Development* 18, no. 4 (December 2011): 192–203.
- Gill, Kathleen. "The Moral Functions of an Apology." *The Philosophical Forum* 31, no. 1 (March 2000): 11–27.
- Griswold, Charles L. "Forgiveness: A Philosophical Exploration." *Cambridge University Press* (2007): 271.
- Hafnidar, Hafnidar, L. Chang, and H. Lin. "Forgiveness as a Mediator for the Relationship between Spirituality and Posttraumatic Growth in Aceh Conflict Victims, Indonesia." *International Journal of Social Science and Humanity* 2, no. 3 (2013): 237–241.
- Hamzah, Murizal. *Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*. Edited by M. Adli Abdullah. Cet.1. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2014.
- Hasan, Husaini Muhammad. *Dari Rimba Aceh Ke Stockholm: Catatan Dr. Husaini M. Hasan, Sp. OG. Ketika Bersama Dr. Tengku Hasan M. Di Tiro, B.S., M.A., Ph.D., LL.D., Proklamator Aceh Merdeka*. Cetakan pertama. Jakarta: Batavia Publishing, 2015.
- Hogg, Nicole. "Women's Participation in the Rwandan Genocide: Mothers or Monsters?" *International Review of the Red Cross* 92, no. 877 (March 2010): 69–102.
- Horikoshi, Hiroko. "The Dar Ul-Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in the Historical Process." *Southeast Asia Program Publications at Cornell University* 20 (October 1975): 58.
- Horn, Rebecca, Eve S Puffer, Elisabeth Roesch, and Heidi Lehmann. "Women's Perceptions of Effects of War on Intimate Partner Violence and Gender Roles in Two Post-Conflict West African Countries: Consequences and Unexpected Opportunities." *Conflict and Health* 8, no. 1 (2014): 12.
- Ishak, Otto Syamsuddin. *Dari Maaf Ke Panik Aceh*. 1st ed. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000.

- Konstam, Varda, Miriam Chernoff, and Sara Deveney. "Toward Forgiveness: The Role of Shame, Guilt Anger, and Empathy." *Counseling and Values* 46, no. 1 (October 2001): 26–39.
- Kvitashvili, Elisabeth. "Women and Conflict: An Introductory Guide For Programming." United States Agency for International Development (USAID), 2007.
- Mariana, Anna. *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang Dan Neofasisme Orde Baru*. Cetakan pertama. Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015.
- Mariani, Nina. "Ahmadiyah, Conflicts, and Violence in Contemporary Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 1 (June 1, 2013): 1–30.
- McCullough, Michael E. "Forgiveness: Who Does It and How Do They Do It?" *Current Directions in Psychological Science* 10, no. 6 (December 2001): 194–197.
- McCullough, Michael E, Everett L Worthington, and Kenneth C Rachal. "Interpersonal Forgiving in Close Relationships." *Journal of Personality and Social Psychology* 73, no. 2 (n.d.): 321–336.
- McCullough, Michael E., and Everett L. Worthington, Jr. "Religion and the Forgiving Personality." *Journal of Personality* 67, no. 6 (December 1999): 1141–1164.
- Miller, Andrea J., Everett L. Worthington, and Michael A. McDaniel. "Gender and Forgiveness: A Meta-Analytic Review and Research Agenda." *Journal of Social and Clinical Psychology* 27, no. 8 (October 2008): 843–876.
- Morfit, Michael. "The Road To Helsinki: The Aceh Agreement and Indonesia's Democratic Development." *International Negotiation* 12, no. 1 (2007): 111–143.
- Pohlman, Annie. "Sexual Violence as Torture: Crimes against Humanity during the 1965–66 Killings in Indonesia." *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (October 2, 2017): 574–593.
- Puspita Dewi, I Dewa Ayu Dwika, and Nurul Hartini. "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (2017): 51–62.
- Reid, Anthony. *Sumatera: revolusi dan elite tradisional*. Translated by Tom Anwar. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Reni Susanti, Raudatussalamah dan. "Pemaafan (Forgiveness) Dan Psychological Wellbeing Pada Narapidana Wanita." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 13, no. 2 (2016): 219–234.
- Robinson, Geoffrey. "Down to the Very Roots: The Indonesian Army's Role in the Mass Killings of 1965–66." *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (October 2, 2017): 465–486.
- Romero, Catherine, and David B. Mitchell. "Forgiveness of Interpersonal Offenses in Younger and Older Roman Catholic Women." *Journal of Adult Development* 15, no. 2 (June 2008): 55–61.
- Sari, Kartika. "Forgiveness pada Istri sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami" 11, no. 1 (2012): 50–58.
- Schulze, Kirsten E. *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*. East-West Center, 2004.
- Schulze, Kirsten E. "The Struggle for an Independent Aceh: The Ideology, Capacity, and Strategy of GAM." *Studies in Conflict & Terrorism* 26, no. 4 (July 2003): 241–271.
- Sharlach, Lisa. "Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda." *New Political Science* 22, no. 1 (March 2000): 89–102.

- Srimulyani, Eka. "Islam, Perempuan Dan Resolusi Konflik Di Aceh (2000 – 2005)." *Jurnal Analisis* XII, no. 2 (2012): 20.
- Suharsono, Martinus, and Dp Budi Susetyo. "Karakteristik Pemaafan Berbasis Budaya Jawa." *PSIKODIMENSLA* 16, no. 1 (July 4, 2017): 81.
- Toussaint, Loren, and Jon R. Webb. "Gender Differences in the Relationship Between Empathy and Forgiveness." *The Journal of Social Psychology* 145, no. 6 (December 2005): 673–685.
- Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual Di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Translated by Harsutejo. Cet.1. Yogyakarta: Galang Press, 2010.
- Worthington, Everett L., ed. *Dimensions of Forgiveness: Psychological Research & Theological Perspectives*. Laws of life symposia series v. 1. Philadelphia: Templeton Foundation Press, 1998.
- . *Forgiveness and Reconciliation: Theory and Application*. New York: Routledge, 2006.